

Masalah, Kebutuhan, dan Pelayanan Keagamaan di Kawasan Perbatasan Kabupaten Karimun

Abdul Jamil

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI

Email: ajamilwahab@gmail.com

Diterima redaksi tanggal 3 Juli 2014, diseleksi 10 Juli 2014, dan direvisi 19 Agustus 2014

Abstract

Karimun Regency is located in the periphery of Indonesia, located on the shores and bordering international shipping lanes. As a territory on the border, Karimun is a strategic area. Its strategic position means that Karimun is plagued with a number of issues, including religious ones. This qualitative study describes the development of religious service by the local offices of the Ministry of Religious Affairs—both its successes and its limits. This study suggests that there are “gaps” in the organizational structure between the Ministry of Religious Affairs in Jakarta with the local offices. This study argues that discrimination in the carrying out of religious service occurs. It is the leadership that has the capacity to deal with the deficiencies in organizational structure. It needs to address this issue; if not, the disharmony amongst interreligious groups in Karimun will continue.

Keywords: Border Area, Karimun Regency, Religious Services.

Pendahuluan

Persoalan di wilayah perbatasan memang sangat kompleks. Kompleksitas sosial budaya ini semestinya bisa dipotret secara utuh untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai keadaan di sana. Persoalan di wilayah perbatasan tersebut,

Abstrak

Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten terluar dari wilayah Indonesia, karena wilayah lautnya yang berbatasan dengan jalur pelayaran internasional. Sebagai daerah perbatasan, Karimun merupakan daerah yang strategis, namun sebagai kawasan perbatasan tentunya memiliki sejumlah persoalan, termasuk di bidang pelayanan Keagamaan. Melalui penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif diketahui gambaran tentang perkembangan pembangunan di bidang pelayanan keagamaan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama, baik sisi-sisi keberhasilannya maupun adanya beberapa fenomena yang kurang sesuai harapan. Nampak adanya “kesenjangan” dalam hal kebijakan struktur organisasi yang ditetapkan Kementerian Agama Pusat dengan kebutuhan Kankemenag di lapangan. Hal ini berimplikasi pada adanya diskriminasi dalam pelayanan keagamaan. Pada sisi lain, *leadership* yang seyogyanya mampu ‘menambal’ kekurangan dalam struktur organisasi juga terasa masih belum sesuai harapan, sehingga masih menyisakan disharmoni dalam hubungan antarumat beragama di Kabupaten Karimun.

Kata Kunci: Kawasan Perbatasan, Kabupaten Karimun, Pelayanan Keagamaan.

tidak hanya aspek keamanan, infrastruktur, ekonomi, dan pariwisata, tetapi juga meliputi banyak aspek menyangkut kehidupan sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Aspek-aspek ini sudah sepatutnya tidak diabaikan dalam setiap kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari hasil beberapa

penelitian tentang kawasan perbatasan, di antaranya hasil kajian Puslitbang Kesos, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial tentang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Perbatasan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, diketahui adanya beberapa persoalan, yaitu: 1). sumber-sumber pelayanan masyarakat yang bisa diakses penduduk umumnya masih sangat terbatas; 2). kemampuan penduduk untuk mengelola sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan) belum cukup memadai; 3). sumber daya sosial khususnya yang didasarkan pada keagamaan belum mampu didayagunakan untuk penanggulangan masalah kesejahteraan sosial; dan 4). masih minimnya infrastruktur desa.

Salah satu daerah yang dikategorikan sebagai perbatasan adalah Kabupaten Karimun. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten terluar dari wilayah Indonesia karena wilayah lautnya yang berbatasan dengan jalur pelayaran internasional yaitu Selat Malaka. Di sebelah utara perairan laut Karimun berbatasan langsung dengan Selat Singapura dan Semenanjung Malaysia. Sebagai daerah perbatasan, Karimun merupakan daerah yang strategis, namun karena letaknya sebagai kawasan perbatasan, Karimun tidak luput dari sejumlah persoalan termasuk dalam hal pelayanan keagamaan, sebagaimana terjadi di kawasan perbatasan lainnya. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Karimun, yaitu antara lain: *Pertama*, sumber daya alam Karimun yang melimpah namun tidak dibarengi dengan tingginya kualitas sumber daya manusia, menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya masyarakat Karimun menjadi karyawan atau buruh di Malaysia. Sementara warga Malaysia dan Singapura justeru datang berlibur ke Karimun. Hal ini pula yang mengakibatkan Karimun rentan terhadap ancaman

Transnasionalisme berupa ancaman nirmiliter baik dalam bentuk sosial budaya, ideologi, maupun paham-paham keagamaan dari luar yang mungkin tidak sesuai dengan jatidiri bangsa. *Kedua*, Kabupaten Karimun merupakan daerah kepulauan yang terdiri atas 249 buah pulau, namun hanya 54 pulau saja yang sudah berpenghuni. Secara geografis, sebagai daerah kepulauan, situasi semacam ini menimbulkan sejumlah persoalan krusial bagi upaya pemerataan pembangunan di sana, seperti minimnya infrastruktur dan terbatasnya sumber-sumber pelayanan masyarakat. *Ketiga*, kebijakan Kementerian Agama yang "sentralistik", sebagaimana tertuang dalam PMA No 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, ini bisa menjadi persoalan tersendiri. Implementasi penanganan berupa program-program pembangunan di bidang keagamaan, sejatinya harus mengacu kepada akar masalah yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, dan bertumpu kepada sumber daya yang ada di lingkungan masyarakat.

Terkait dengan beberapa persoalan tersebut, menarik untuk dilakukan kajian tentang bagaimana pelayanan keagamaan di Kabupaten Karimun, sehingga dapat ditemukan berbagai persoalan pelayanan keagamaan di sana, baik menyangkut aspek permasalahan atau kendala, kebutuhan, bentuk-bentuk pelayanan yang telah dilakukan, sumber-sumber daya yang tersedia, aspek-aspek pelayanan keagamaan yang selama ini sudah tersedia, dan hal apa saja yang belum tersedia namun dibutuhkan masyarakat. Kajian ini penting dilakukan sebagai bahan informasi bagi perumusan dan penetapan kebijakan terkait perencanaan dan penyempurnaan pelaksanaan program pembangunan bidang keagamaan di Kabupaten Karimun di masa yang akan datang.

Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian yaitu: *Pertama*, bagaimana gambaran teraktual tentang pelayanan keagamaan di daerah perbatasan, dan problem apa saja yang dialami serta bagaimana kebudayaan negara tetangga berpengaruh terhadap pelayanan yang ada di Indonesia? *Kedua*, kebijakan, program, dan pembangunan fisik apa saja yang dilakukan secara spesifik oleh Kementerian Agama bagi pengembangan daerah perbatasan? *Ketiga*, sejauhmana kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan keagamaan yang ideal di daerah perbatasan? Oleh karena itu, penelitian tentang pelayanan keagamaan di Kabupaten Karimun ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

Kerangka Konseptual

Daerah Perbatasan

Daerah perbatasan dapat dimaknai sebagai sebuah wilayah yang terletak di perbatasan antar daerah dalam satu negara, atau daerah yang berada di perbatasan antar negara. Pada wilayah seperti ini komunikasi atau interaksi antar penduduk di dua daerah atau dua negara yang berbatasan biasanya berlangsung cukup intensif. Pengertian daerah perbatasan menurut UU Nomor: 26 Tahun 2007 (Dr. Suprayoga Hadi, Bappenas, Maret 2010), adalah wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar. Sedangkan pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Di

38 Kabupaten/kota perbatasan prioritas terdapat 60 pulau dari keseluruhan 92 pulau kecil terdepan (65 %); 20 pulau berpenghuni dan 40 lainnya tidak berpenghuni.

Untuk pengelolaan kawasan perbatasan pemerintah pusat membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang memiliki visi terwujudnya negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju. Visi ini diwujudkan dengan tiga capaian misi yaitu: *Pertama*, terwujudnya perbatasan sebagai wilayah yang aman, melalui peningkatan keamanan yang kondusif. *Kedua*, terwujudnya perbatasan sebagai wilayah yang tertib, melalui peningkatan kerjasama internasional, penegakan hukum, kesadaran politik, dan penetapan batas negara. *Ketiga*, terwujudnya perbatasan sebagai wilayah yang maju, melalui peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, dan SDM (Meoldoko. 2014). Kebijakan pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia saat ini berubah orientasinya, dari "*inward looking*" menjadi "*outward looking*" sebagai pintu gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Sedangkan pendekatannya selain keamanan, juga pendekatan kesejahteraan.

Pelayanan Keagamaan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian Agama Tahun 2010-2014 disebutkan bahwa Kementerian Agama memiliki misi untuk: 1). Meningkatkan kualitas kehidupan beragama; 2). Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama; 3). Meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; 4). Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kelima hal

tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai lima bidang prioritas pembangunan di bidang keagamaan oleh Kementerian Agama untuk tahun 2010-2014. Untuk mewujudkan RPJM tersebut, selanjutnya Kementerian Agama menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama tahun 2010-2014 yang di antaranya berisi sejumlah program di bidang pelayanan keagamaan.

Berdasarkan Renstra tersebut maka yang dimaksud dengan pelayanan keagamaan dalam kajian ini adalah pelayanan keagamaan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama yang antara lain meliputi: *Pertama*, pembangunan sarana dan prasarana keagamaan berupa rumah ibadah terutama di daerah terkena bencana, dan terisolir, serta pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah pemekaran. *Kedua*, Pelayanan keagamaan oleh KUA (yang berbasis di tingkat kecamatan) sebagai lini terdepan dalam pelayanan keagamaan bagi masyarakat, seperti bimbingan dan pelayanan masyarakat di bidang perkawinan dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah, serta bimbingan ibadah haji. *Ketiga*, pengelolaan dana sosial keagamaan mulai dari pengumpulan sampai dengan distribusinya, seperti zakat, infak, shadaqoh, dan wakaf. Dana sosial keagamaan menjadi sangat strategis, karena di satu sisi merupakan bentuk pengamalan ajaran agama tetapi dilain pihak dapat membantu meringankan masyarakat dari kemiskinan. *Keempat*, pembinaan keagamaan di masyarakat. Hal ini dilakukan melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama oleh para penyuluh agama. *Kelima*, perbaikan kualitas pelayanan ibadah haji. Kualitas pelayanan ibadah haji ini setiap tahunnya terus ditingkatkan mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan ibadah di Arab Saudi. *Keenam*, upaya menciptakan kerukunan

umat beragama. Hal ini dilakukan melalui berbagai forum musyawarah/dialog, kerjasama antar pemuka agama, pembentukan seketariat bersama baik di pusat maupun di beberapa daerah, pendidikan berwawasan multikultural. Namun demikian, sampai saat ini diakui masih sering muncul ketegangan sosial yang melahirkan konflik intern dan antar umat beragama.

Pengertian pelayanan keagamaan dalam penelitian ini, pendidikan keagamaan tidak dimasukkan dalam permasalahan yang diteliti, karena secara tugas dan fungsi, pendidikan keagamaan tidak termasuk dalam kajian Puslitbang Kehidupan Keagamaan melainkan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan FGD (*Focus Group Discussion*). Terkait wawancara, informan yang dilibatkan dalam penggalan data terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pejabat struktural Kantor Kementerian Agama yang terdiri dari unsur staf dan pejabat Kantor Kementerian Agama tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun serta Kantor Urusan Agama. Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan melalui diskusi terfokus (FGD) dilakukan dalam sebuah tempat yang bersifat informal. Pesertanya terdiri dari anggota masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Peserta FGD tidak lebih dari 15 orang. Dengan jumlah peserta yang terbatas tersebut diharapkan semuanya dapat berkontribusi mengemukakan pendapatnya. Sementara itu, data pendukung lainnya diperoleh

dengan cara melakukan *review* berbagai buku, hasil penelitian, dokumen dan laporan, baik dari institusi Kementerian Agama maupun pemerintah daerah.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret dan April 2014. Setelah pengumpulan data melalui kajian di lapangan, selanjutnya dilakukan analisis data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah bersifat induktif yaitu melalui reduksi data, pengelompokan, dan kategorisasi data, dengan jalan abstraksi yang merupakan upaya memuat rangkuman inti, proses dan pernyataan. Selanjutnya, sebelum kesimpulan, terlebih dahulu dilakukan interpretasi untuk memaknai, mendiskusikan, membandingkan, dan mencocokkan dengan teori yang ada.

Sekilas Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Kepulauan Riau. Secara formal, Karimun berdiri sebagai kabupaten sejak 1999. Secara geografis Kabupaten Karimun berbatasan langsung dengan: a). sebelah Utara: Selat Philip Singapura dan Semenanjung Malaysia; b). sebelah Selatan: Kabupaten Indragiri Hilir; c). sebelah Barat: Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pelalawan; d). sebelah Timur: Kota Batam.

Secara historis, Karimun dahulu merupakan daerah kerajaan Sriwijaya (Buddha) hingga keruntuhannya pada abad ke-13. Sejak saat itu Karimun mendapatkan pengaruh agama Buddha, bahkan hingga saat ini jejak-jejak agama Buddha masih terlihat. Letaknya yang strategis yaitu di Selat Malaka, Karimun sering dilalui kapal-kapal dagang hingga masuk pengaruh Kerajaan Malaka (Islam) mulai tahun 1414, dan saat itu Karimun termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Malaka.

Sejak kejatuhan Malaka yang kemudian digantikan perannya oleh Kerajaan Johor, Karimun dijadikan basis kekuatan angkatan laut untuk menentang Portugis sejak masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah I (1518-1521), hingga Sultan Ala Jala Abdul Jalil Ri'ayat Syah (1559-1591). Selanjutnya pada kurun waktu 1722-1784, Karimun berada dalam kekuasaan Kerajaan Riau-Lingga, pada masa itu Karimun, terutama Pulau Kundur terkenal sebagai penghasil gambir dan penghasil tambang (seperti granit dan biji timah). Karimun terus berkembang dan mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Raja Ali Haji.

Dalam Traktat London (Treaty of London), antara Inggris dan Belanda menyepakati untuk membagi wilayah kekuasaan Kerajaan Riau-Lingga menjadi dua bagian yaitu, Tanah Semenanjung (termasuk Malaka) dan Singapura menjadi daerah pengaruh Inggris, sedangkan Kepulauan Riau dan Lingga menjadi daerah pengaruh Belanda. Jauh sebelum Traktat London tersebut ditandatangani, Kerajaan Riau-Lingga dan kerajaan Melayu sebenarnya telah dilebur jadi satu dengan wilayahnya yang meliputi Kepulauan Riau, Johor, dan Malaka (Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir.

Karimun pernah mengalami perang saudara yaitu pada tahun 1827, antara pasukan yang di Pertuan Muda Raja Ja'far yang berpusat di Hulu Riau dengan Sultan Husein yang berpusat di Singapura. Konflik ini dipicu oleh ketidaksetujuan Sultan Husin menyerahkan Karimun ke tangan Belanda sementara yang di Pertuan Muda Riau VI Raja Ja'far (1808-1832) telah memberitahukan kepada Sultan Husein (berdasarkan traktat London), bahwa Pulau Karimun tersebut bukanlah daerah takluk Johor atau daerah takluk Sultan Husein, oleh karenanya mereka tidak berhak mendiami pulau tersebut.

Dengan konflik yang berkepanjangan, menyebabkan Pulau Karimun tidak kondusif untuk aktifitas perdagangan dan mulai ditinggalkan. Keadaan Karimun yang demikian dilaporkan kepada yang di Pertuan Muda Riau, dan oleh beliau sepakat menyerahkan Pulau Karimun Kepada Raja Abdullah bin Raja Haji Ahcmad, serta diangkat menjadi Amir Karimun pertama. Semenjak saat itu stabilitas Karimun mulai pulih, kemudian datang seorang Resident Belanda bernama Fandenbosch yang meminta izin untuk membuka tambang timah, dan diizinkan dengan dibuatkan perjanjian dengan pihak kerajaan. Maka oleh Fandenbosch di Pulau Karimun di buka tambang timah yang diberi nama Monos. Sehingga tidak lama kemudian keadaan Pulau Karimun menjadi ramai. Meskipun pada dasarnya penambangan itu hanya menguntungkan pihak Belanda. Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir-amir sebagai District Thoarden untuk daerah yang besar dan Order District Thoarden untuk daerah yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau-Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah karesidenan yang dibagi menjadi dua Afdelling yaitu: Afdelling Tanjung Pinang dan Afdelling Indragiri.

Hingga meletuslah perang Asia Timur Raya pada akhir tahun 1941 yang dicitus oleh Jepang. Dan Jepang masuk kewilayah Karimun setelah penaklukan Singapura tanggal 15 Februari 1942 oleh Jepang dari Inggris, selanjutnya penaklukan Tanjungpinang pada tanggal 21 Februari 1492. dan setelah itu Pulau Karimun. Sejak saat itu pemudapemuda Karimun yang tersebar di Pualu Moro, Kundur, Meral, Buru, dan Karimun sendiri terlibat dalam Pasukan Gyutai tentara Jepang, yaitu pasukan

yang bertugas mengawal pulau-pulau. Sehingga bagi masyarakat Karimun dan Kepulauan Riau umumnya tidak ada pengerahan tenaga kerja paksa (Romusha). Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu, maka Indonesia dinyatakan merdeka dan memproklamirkan kemerdekaannya pada Tanggal 17 Agustus 1945.

Sejarah selanjutnya di era kemerdekaan, berdasarkan surat keputusan delegasi Republik Indonesia provinsi Sumatera Tengah, tanggal 18 Mei 1956 menggabungkan diri ke dalam wilayah RI dan Kepulauan Riau diberi status daerah otonomi tingkat II yang dikepalai seorang Bupati sebagai kepala daerah. Saat itu Karimun merupakan salah satu kawedanan dari 4 kawedanan yang ada di Kab. Kepulauan Riau. Selanjutnya pada tahun 1999, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu: Kab. Kepulauan Riau, Kab. Karimun, dan Kab. Natuna. Maka sejak 1999 itulah secara resmi berdiri kabupaten Karimun (Kabupaten Karimun. 2013).

Selanjutnya, mengenai kependudukan, berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Karimun mencapai 280.949 jiwa, terdiri 145.283 laki-laki dan 135.666 perempuan. Dari jumlah tersebut komposisi jumlah penduduk yang produktif (usia dewasa; 15-64 tahun) sebesar 194.212 jiwa atau 69,13%. Sedangkan komposisi jumlah penduduk yang tidak produktif (anak-anak dan lanjut usia) sebesar 86.737 jiwa atau 30,87%. Penduduk tersebut tersebar dalam beberapa wilayah pemukiman yang terbagi dalam bebarapa pulau. Karimun sebenarnya terdiri dari 249 buah pulau, namun yang sudah berpenghuni hanya 54 pulau.

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Buddha	Hindu	Khonghucu
1	Karimun	47.025	3.485	1.009	8.491	35	0
2	Kundur	30.017	987	326	3.746	5	292
3	Moro	19.155	195	126	1.140	1	2
4	Meral	29.320	592	2.606	8.317	0	549
5	Tebing	23.069	1.511	963	1.550	23	95
6	Kundur Utara	12.320	326	41	1.626	0	33
7	Buru	9.759	119	12	1.419	5	6
8	Kundur Barat	17.219	297	13	1.770	1	4
9	Durai	7.359	41	10	101	0	1
10	Ungar	6.823	40	0	196	0	0
11	Meral Barat	11.209	323	457	579	0	13
12	Belat	6.898	345	6	441	0	0
Jumlah		220.173	8.261	5.569	29.394	70	995

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Tahun 2013

Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun

Pelayanan keagamaan di Kabupaten Karimun dilakukan secara struktural oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang jumlahnya mencapai 9 KUA. Dalam hal ini, Kantor Kementerian Agama Karimun merupakan *agent*, atau pelaksana yang memiliki kewenangan delegatif dari Kementerian Agama Pusat dalam upaya memberikan pelayanan keagamaan sesuai tugas dan kewenangan yang melekat padanya.

Mengenai profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, dapat dikemukakan beberapa hal termasuk kondisi bangunan kantor tersebut. Dari luar, gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun terlihat megah. Gedung dua lantai itu didominasi warna hijau sehingga nampak terlihat cerah. Suasana nyaman terasa sejak memasuki halaman gedung karena lapangan parkir cukup luas. Gedung ini berada di kompleks kantor pemerintahan daerah Kabupaten Karimun. Tidak jauh dari gedung ini terlihat kantor Bupati sebagai pusat pemerintahan daerah. Ketika masuk ke dalam kantor, disambut

ruangan penerima tamu (*front desk*). Di bagian dinding ruang tersebut terdapat struktur organisasi, sehingga siapapun yang baru masuk ke sana bisa dengan mudah memahami bagaimana struktur organisasi dan siapa saja para pejabat yang menduduki posisi penting di lingkungan kantor tersebut.

Secara historis, sejarah berdirinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun tidak lepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Karimun. Dengan diterbitkannya UU Nomor: 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Karimun, bersama 35 Kabupaten lainnya di seluruh Indonesia yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 4 Oktober 1999, Kabupaten Karimun kemudian diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober. Sementara itu Kementerian Agama Kabupaten Karimun sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 381 Tahun 2001 Tanggal 23 Juli 2001. Sebelumnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau dan pada tahun 2005 sejalan dengan terbentuknya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, maka Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Karimun berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kepulauan Riau.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun mulai beroperasi melaksanakan tugas-tugasnya secara definitif setelah dilantiknya pejabat Eselon IV oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau pada tanggal 14 November 2001 di Tanjungpinang. Pada tahun 2001 sampai dengan akhir tahun 2005 berkantor di sebuah ruko yang disewa di Jl. Pertambangan No. 49 Kp. Baru Tebing. Pada tanggal 17 Januari 2006 bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1426 H Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun yang dibangun secara bertahap tersebut diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Bapak Prof. Dr. H. Faisal Ismail, MA, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman, Poros, Tg. Balai Karimun. Sejak saat itu maka secara formal bangunan Kantor Kementerian Agama Karimun berdiri dan menjadi pusat pelayanan keagamaan masyarakat Kabupaten Karimun.

Berdasarkan PMA Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun terdiri atas: a). Kepala; b). Subbag Tata Usaha; c). Seksi Pendidikan Islam; d). Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e). Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f). Penyelenggara Syariah; g). Penyelenggara Buddha; dan h). Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelayanan Keagamaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun

Pelayanan keagamaan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pembangunan Sarana Keagamaan

Pembangunan Rumah Ibadat

Saat ini terdapat enam agama di Kabupaten Karimun, secara umum umat Islam merupakan terbesar. Untuk itu, di Karimun rumah ibadat terbanyak adalah masjid, jumlahnya mencapai 209 buah. Di samping masjid juga terdapat 36 mushala. Data lengkap terkait jumlah rumah ibadat dapat dilihat dalam table berikut.

Data Rumah Ibadat di Karimun Tahun 2013

No	Agama	Rumah Ibadat	Jumlah
1	Islam	Masjid	209
		Mushala	36
2	Kristen	Gereja	24
3	Katolik	Gereja	8
		Kapel	-
4	Hindu	Pura	-
5	Buddha	Vihara	11
		Cetiya	37
6	Khonghucu	Klenteng	1

Sumber : Kanwil Kemang Provinsi Kepulauan Riau

Rumah Ibadat dari berbagai agama tersebut secara umum dibangun secara swadaya oleh masyarakat, hanya beberapa mesjid saja yang pernah mendapatkan bantuan dan itupun hanya dana rehab (perbaikan gedung). Berdasarkan diskusi dengan para tokoh agama, hingga saat ini belum ada bantuan yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada rumah-rumah ibadat selain agama Islam tersebut. Selain bantuan fisik rumah ibadat, pelayanan lainnya yang diberikan Kankemenag adalah di bidang kemasjidan adalah pembinaan bagi pengurus masjid, ada dua kali pertemuan pembinaan kemasjidan dalam satu tahun. Dalam hal ini terdapat kendala, yaitu para pengurus utama yang diundang yaitu ketua masjid biasanya diwakilkan kepada pengurus lain.

Pembangunan KUA

Kabupaten Karimun memiliki 9 KUA, biaya pembangunan, rehab (perbaikan) gedung, dan biaya operasional KUA di Kabupaten Karimun seluruhnya dibiayai oleh Kementerian Agama dengan anggaran dari APBN. Namun demikian terdapat 1 KUA yaitu KUA Kecamatan Tebing yang pembangunan gedungnya didanai oleh APBD. Hal ini ternyata kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, yakni Kementerian Agama berdasarkan peraturan yang ada tidak dapat memberikan dana rehab maupun pemeliharaan gedung, karena statusnya bukan milik Kementerian Agama.

Selain pembangunan gedung dan rehab, Kementerian Agama melalui APBN juga memberikan bantuan biaya operasional KUA. Jumlah bantuan yang diterima KUA sejak 2014 yaitu Rp. 3 juta, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sebagai berikut: 1 juta untuk dinas Kepala KUA, honorer 1.1 juta, 500 ribu untuk ATK, dan 400 ribu untuk pelayanan dan jasa (listrik, air, dan lain-lain).

Pelayanan Keagamaan oleh KUA

Pencatatan Perkawinan

Pendaftaran pencatatan perkawinan untuk masyarakat Muslim di Kabupaten Karimun dilakukan di KUA. Terdapat 9 KUA dari 11 Kecamatan di Kabupaten Karimun. Total peristiwa nikah (N) di tahun 2013 adalah sebanyak 1.960 peristiwa. Peristiwa Nikah (N) di Kabupaten Karimun umumnya lebih sedikit dibanding wilayah lain. Hal ini disebabkan karena persyaratan perkawinan oleh KUA sangat selektif, semua item yang ada harus dipenuhi oleh para calon pengantin. Karena ketatnya persyaratan di setiap KUA yang ada di Kabupaten Karimun ini, banyak calon yang merasa persyaratannya tidak

bisa dipenuhi akhirnya mendaftarkan perkawinannya ke luar Karimun.

Di Kabupaten Karimun pasangan yang menikah di kantor lebih banyak di banding di luar kantor. Untuk di KUA Meral pada Januari 2013 jumlah total pasangan yang menikah sebanyak 32 pasang. Dari jumlah tersebut, 13 pasang menikah di luar kantor, sisanya 19 pasang menikah di kantor KUA. Pasangan calon pengantin rata-rata sudah mendaftar 10 hari sebelum hari pernikahan. Mereka datang umumnya bersama RT yang berperan sebagai pembantu keluarga mempelai dalam mengurus surat-surat yang dibutuhkan, para RT ini biasanya mendapat jasa sekitar 250 ribu-an.

Untuk pelayanan perkawinan di KUA Kecamatan Tebing, total perkawinan berjumlah 15 hingga 20 pasangan pengantin. Untuk pelaksanaan perkawinan, jumlahnya berimbang antara yang diselenggarakan di rumah dan di kantor. Terkait perkawinan di luar kantor biasanya pihak keluarga pengantin memberi sekedar uang transport. Menurut Kepala KUA, suatu ketika pernah uang tersebut ditolak namun pihak keluarga pengantin datang dan mengatakan, "tolong lah pak, terima ini". Akhirnya pemberian itu terpaksa diterima. Pendaftaran perkawinan biasanya diantar oleh RT, ada juga beberapa pengantin yang langsung datang mengurus pendaftaran atau keluarganya atau wali pengantin tanpa diantar oleh RT. Di KUA Tebing tidak ada P3N. Untuk pelayanan pernikahan, masyarakat langsung mendatangi KUA untuk mendaftar, dan pernikahan pun umumnya dilakukan di KUA.

Sedangkan untuk KUA Kecamatan Karimun perkawinan dilakukan di kantor. Namun jika rumahnya di kepulauan, pihak KUA biasanya mendatangi rumah pengantin. Sesuai ketentuan yang ada, biaya nikah yang harus dibayar pengantin adalah sebesar Rp. 30 ribu. Jika pernikahan

dilakukan di luar kantor maka biasanya keluarga pengantin memberikan uang pengganti transport kepada petugas KUA yang datang. Menurut kepala KUA, untuk nikah di luar kantor, biaya transportasi petugas sesuai arahan Kantor Kementerian Agama kepada KUA, agar berhati-hati dan jangan melampaui batas. Ia juga mengatakan bahwa menurut Wakil Menteri Agama RI, Prof. Dr. Nazarudin Umar, saat memberikan pengarahan di Karimun dipertegas bahwa hal tersebut bukan gratifikasi. Menurutnya, itu merupakan hal wajar seperti halnya ketika seorang Khotib diberi dana transportasi selesai menjalankan tugas khutbah. Biaya transportasi petugas KUA untuk setiap perkawinan jumlahnya sekitar 200-250 ribu, dan masyarakat sendiri lah yang memberi.

Pengelolaan dana Zakat dan Wakaf

Untuk wilayah Propinsi Kepulauan Riau, pengelolaan ZIS di Kabupaten Karimun tergolong ke dalam pengelolaan terbaik. Saat ini terdapat fasilitas mobil

dari Pemerintah Daerah Karimun sebagai apresiasi atas kinerja lembaga pengelola ZIS dalam pengelolaan dana sosial umat tersebut. Dalam hal pengumpulan ZIS, peran Bupati sangat besar. Beliau langsung memberi intruksi kepada setiap instansi agar memaksimalkan UPZ masing-masing. Dalam catatan seputar data ZIS yang diambil berdasarkan laporan ZIS Kementerian Agama Kabupaten Karimun tahun 2013, jumlah muzakki sebanyak 197.724 orang, jumlah mustahiq 12.923, jumlah UPZ 216 dan total jumlah pengumpulan ZIS sebesar Rp 5.685.827.880.-

Sedangkan untuk pelayanan akte ikrar wakaf, dari data Kementerian Agama Kabupaten Karimun terlihat bahwa masih terdapat beberapa tanah wakaf yang masih dalam status Akte Ikrar Wakaf (AIW) dan belum berstatus sertifikat. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi para kepala KUA sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal optimalisasi pengelolaan wakaf. Data jumlah wakaf di Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jml Wakaf (Persil)	Luas M ²	Bersertifikat	Akte Ikrar Wakaf
1	Karimun	25	21.281	9	17
2	Kundur	73	106.145	24	54
3	Moro	27	23.015	15	12
4	Meral	24	49.036	11	13
5	Tebing	39	63.246	22	17
6	Kundur Utara	27	38.980	9	18
7	Buru	15	12.792	3	12
8	Kundur Barat	35	73.881	8	27
9	Durai	7	5.060	3	4
10	Ungar	15	7.626	5	10
11	Belat	13	6.701	0	13
Jumlah		306	407.766	109	197

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun

Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Masyarakat

Saat ini jumlah Penyuluh Agama Islam yang berstatus PNS di Kabupaten Karimun hanya berjumlah 2 orang, dan Penyuluh Agama Islam non-PNS jumlahnya sekitar 114 orang. Sedangkan jumlah Penyuluh Agama non-muslim berjumlah 14 orang. Saat ini Penyuluh Agama Islam, ditugaskan memberikan bimbingan dan penyuluhan di masjid-masjid, dengan jumlah penyuluh di setiap satu masjid sebanyak satu orang. Pada tahun 2014, selain ditugaskan di masjid, para penyuluh ini juga akan ditugaskan ke majelis talim. Penyuluh agama dijadikan juru penerang kegiatan Kementerian Agama, seperti pembinaan aqidah, ibadah, akhlak, dan aspek keagamaan lainnya. Para penyuluh juga ditugaskan menyosialisasikan program-program Kementerian Agama seperti 'maling' (magrib keliling), magrib mengaji, dan lain-lain.

Kabupaten Karimun sebagai daerah terluar/perbatasan, mau tidak mau banyak bersentuhan dengan pihak asing khususnya para wisatawan (turis) dan pelaku bisnis. Terkait banyaknya turis atau wisatawan maupun pelaku bisnis yang datang ke Karimun, menurut Jamzuri Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, selama ini kedatangan wisatawan telah menimbulkan masalah dalam hal akhlak dan etika. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan standar etika yang berlaku yakni standar etika wisatawan yang datang ke Karimun belum sesuai dengan budaya Melayu sebagai budaya masyarakat Karimun. Dia juga menambahkan, dahulu Karimun dikenal sebagai kota 'Texas' karena banyak wanita-wanita yang menjual jasa 'penghibur' kepada para wisatawan, khususnya di sekitar kawasan Pasar Baru yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Jamzuri juga menjelaskan, pernah suatu

ketika ada penertiban yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang mengakibatkan terjadinya insiden, hingga gubernur pun mengalami luka-luka, yakni tangannya terkena senjata tajam akibat perlawanan preman di sana yang tidak suka 'bisnisnya' di ganggu.

Namun demikian seiring dengan laju pembangunan di Karimun, kesan Karimun sebagai 'Texas' pun kian memudar. Banyaknya program keagamaan yang dikembangkan ternyata relatif efektif dalam mengurangi kesan Karimun sebagai wilayah 'hitam'. Sejak tahun 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun menggemakan salah satu program untuk mewujudkan visi Karimun, yaitu "membumikan azam iman dan taqwa". Semua lini (SKPD) digerakkan untuk memajukan pendidikan agama, baik melalui TPQ, MDA, dan Majelis Talim melalui BKMT yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Bupati. Peran BKMT sangat strategis sebab anak-anak umumnya lebih dekat dengan ibunya. Besarnya antusiasme masyarakat mengikuti pendidikan TPQ dibuktikan dengan besarnya jumlah santri TPQ yang mengikuti prosesi wisuda. Saat ini baru saja di wisuda 6666 santri TPQ oleh Wakil Menteri Agama RI pada saat penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Karimun pada tahun 2014. Jumlah santri yang diwisuda saat itu adalah yang terbesar, sehingga mendapat pengakuan rekor Muri.

Pembangunan di bidang agama memang menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Pemerintah daerah pun melakukan kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama. Hal itu terlihat dari berdirinya Islamic Center dan Masjid Agung. Kemajuan pembangunan di bidang keagamaan di Karimun ini, ternyata menjadi salah satu pertimbangan

dipilihnya Karimun pada tahun 2014 sebagai penyelenggaraan MTQ tingkat Propinsi Kepulauan Riau. Pembangunan di bidang agama tersebut memiliki beberapa sasaran yaitu: 1). Menunjukkan pada pihak tamu, bahwa Karimun sudah semaju ini; 2). Menunjukkan adanya perhatian yang tinggi oleh Karimun di bidang agama; 3). Adanya kebersamaan masyarakat (sekitar 17.000 warga yang ikut acara ta'aruf) turut serta membangun Karimun (Wawancara dengan Jamzuri, 24 Maret 2014).

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dalam hal penyelenggaraan ibadah haji, pada tahun 2013 terdapat sekitar 140 jamaah yang dibimbing dan dilayani oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Semua calon jamaah haji mengikuti bimbingan manasik di KUA, karena tidak ada Kelompok Bimbingan Haji (KBH) di Karimun. Total frekuensi pembinaan manasik dilakukan sebanyak sekitar 17 kali. Sebanyak 15 kali dilakukan di KUA dan 2 kali di tingkat Kantor Kementerian Agama. Setiap KUA memberikan bimbingan manasik haji untuk sekitar 18 Jamaah. Pembinaan haji Karimun merupakan yang terbaik se-Propinsi Kepulauan Riau (Kepri), sebab kualitas bimbingan yang baik dan jumlah frekuensi yang 17 kali menyebabkan para jamaah cukup memahami bagaimana pelaksanaan ibadah haji (Wawancara dengan Jamzuri, 24 Maret 2014).

Pembinaan Kerukunan Beragama

Kerukunan Intern Umat Islam

Mengenai kerukunan umat beragama khususnya intern agama Islam, selama ini di Kabupaten Karimun belum pernah terjadi konflik keagamaan. Hal ini disebabkan adanya komunikasi yang relatif baik di antara tokoh-tokoh agama

melalui PMKK (Persatuan Mubaligh Kabupaten Karimun) yang anggotanya terdiri atas tokoh agama dan pengurus masjid. Adapun ormas Islam yang banyak diikuti masyarakat di sana adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Namun demikian, mereka pada umumnya bukanlah pengikut paham yang fanatik. Hal ini terlihat ketika bulan Ramadan, mereka umumnya beribadat menurut amaliyah Muhammadiyah, antara lain ketika tarawih jumlah rakaatnya 8 rakaat, meskipun tidak berarti semua warga mengikuti Muhammadiyah. Dalam hal lain, warga justru lebih dekat kepada paham yang dikembangkan Nahdlatul Ulama, misalnya jika ada yang meninggal maka umumnya keluarga dan masyarakat sekitar membacakan tahlil (Wawancara dengan Muhammad Yusuf, 21 Maret 2014).

Konflik kelompok paham keagamaan terjadi antara kelompok paham mayoritas (Ahlussunnah) dengan kelompok Syiah. Kalangan tokoh agama non-Syiah mempersoalkan kembali keabsahan ajaran Syiah. Menurut Adnan Kamal salah seorang pengurus Syiah di Karimun, sorotan negatif ini terjadi setelah Minggu tanggal 2 Februari 2012 Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerjasama dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) melakukan sosialisasi fatwa mengenai penyimpangan Syiah bertempat di Aula utama Pusat Informasi Haji (PIH) Batam. Acara tersebut dihadiri para tokoh agama termasuk dari Kabupaten Karimun. Dalam acara tersebut juga dibagikan buku berjudul "Mengenal dan Mewaspadaai Penyimpangan Syiah di Indonesia." Buku ini dibagikan kepada peserta yang berjumlah 500 orang sesuai sosialisasi. Para tokoh agama yang pulang dari acara tersebut kemudian menyampaikan kembali kepada jemaah mereka masing-masing di berbagai forum keagamaan termasuk khutbah Jumat perihal kesesatan Syiah (Wawancara dengan Adnan Kamal, 25 Maret 2014).

Menurut Jamzuri, Kasubbag Tata Usaha, Isu Syiah muncul kembali menjelang penyelenggaraan MTQ 2014 di Karimun. Ia mengatakan, “jika di luar sudah sangat asin, di intern Karimun sebenarnya kurang asin (belum jadi masalah).” Menurutnya, upaya penanganan konflik pernah dilakukan yaitu dengan dimediasi MUI. Saat itu diundang tokoh-tokoh agama Islam dan pihak Syiah untuk memberikan klarifikasi. Beberapa isu yang berkembang tentang Syiah antara lain: Syiah sholatnya sehari 1 kali dengan dijama, nikah dengan sesama Syiah, nikah kakak-beradik, tidak sholat jumat, dan tidak mau berjamaah. Dalam dialog tersebut pihak tokoh agama non-Syiah dan pihak Syiah secara bebas dan argumentatif menyampaikan pandangannya. Menurut Adnan Kaman, saat itu perwakilan Syiah, Sayid Agil Alatas yang juga pemimpin kaum Syiah di Karimun memberikan banyak penjelasan yang intinya menyebutkan bahwa Syiah sama dengan Muslim lainnya. Tuduhan negatif terhadap Syiah adalah tidak benar dan hanya fitnah belaka. Namun, meskipun sudah dijelaskan secara meyakinkan oleh pihak Syiah, tetapi tetap saja, oleh yang membenci golongan Syiah, mereka dianggap *taqiyah* atau berbohong”.

Komunitas Syiah di Karimun, saat ini bertempat tinggal di desa Wonosari Kecamatan Meral. Ketika bulan Syura mereka menyelenggarakan kegiatan peringatan Asyuro yaitu memperingati wafatnya Husein bin Ali (cucu Nabi Muhammad). Acara tersebut dihadiri oleh pengikut dan simpatisan Syiah yang bukan hanya dari Karimun tapi juga dari luar Karimun. Pada saat peringatan Asyuro tersebut jumlah jemaah yang hadir sekitar 2 ribu-an orang. Dalam memperingati acara tersebut panitia mengundang para tokoh agama termasuk pejabat Kantor Kementerian Agama namun mereka tidak pernah hadir.

Kerukunan Antar Agama

Kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Karimun secara umum berjalan dengan baik. Namun demikian terdapat beberapa persoalan konflik terkait pendirian rumah ibadat yaitu konflik pembangunan kembali gereja Katholik Santo Joseph (Katolik), pendirian Gereja Methodis (Kristen) dan pendirian Cetya (Buddha).

Gereja Katolik Santo Joseph

Gereja Katolik Santo Joseph merupakan gereja tertua di Karimun yang berdiri sejak 1932. Beberapa tahun kemudian yaitu pada 1935 gereja diresmikan, dan kedudukan gereja tersebut merupakan paroki utama untuk wilayah Pulau Karimun. Di Kabupaten Karimun, terdapat dua gereja Katolik yaitu Gereja Santo Joseph dan Gereja Hati Kudus Yesus. Di samping dua gereja tersebut juga terdapat dua kapel. Sedangkan untuk se-Kabupaten Karimun terdapat pula dua gereja lainnya di Moro dan dua gereja di Tanjung Batu Pulau Kundur. Dalam menjalankan kegiatan ibadah, kegiatan ibadat dipimpin dua orang pastor dan satu orang calon pastor. Mengenai jumlah pemeluk diperoleh keterangan bahwa jumlah pemeluk agama Katolik di Pulau Karimun berjumlah sekitar tiga ribu-an jemaat.

Saat ini pihak gereja bermaksud melakukan pemugaran gedung gereja yang kondisinya sudah tua. Kegiatan pemugaran tersebut, awalnya tidak ada kendala. Rekomendasi izin pendirian pun sudah dikeluarkan oleh FKUB. Namun ketika permohonan izin masuk ke Pemerintah Daerah ternyata dianggap bermasalah oleh sebagian pihak. Akhirnya pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun dan FKUB menarik kembali surat rekomendasi

izin pembangunan tersebut. Rencana pembangunan gereja dinilai terlalu besar dan terlalu tinggi, yaitu pembanguunan lantai dua untuk kapasitas 750-an jamaah. Alasan lainnya adalah dikarenakan posisi gereja tepat di depan pelabuhan atau tepat berada di pintu masuk Kota Karimun. Hal tersebut dinilai tidak tepat sebab Karimun adalah Melayu yang dekat dengan Islam. Di samping itu, alasan lainnya adalah gereja tersebut bersebelahan dengan kantor Bupati sehingga jangan sampai muncul anggapan bahwa Bupati lebih dekat dengan pihak Katolik. Mengenai hal tersebut, Kasubbag TU Kantor Kementerian Agama Karimun menyatakan:

“Saat mengajukan ijin renovasi pihak gereja tidak menyertakan gambar, namun setelah izin keluar dan Kementerian Agama memberikan izin rekomendasi, barulah keluar gambar bangunan yang ternyata gereja itu akan diperbesar, tinggi bangunan mencapai sekitar 17 m”.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam rapat, para tokoh agama memberi alternatif yakni volume pembangunan gereja dikurangi atau gereja dibangun di kawasan lain. Selain itu, diusulkan agar tinggi bangunan dikurangi sebab posisi gereja yang berada di pintu masuk kota tersebut akan terlihat sebagai gereja yang besar. Sehingga muncul kekhawatiran jika gereja tersebut akan dipersepsi sebagai simbol Karimun. Padahal Karimun adalah daerah kultur Melayu yang identik dengan Islam.

Saat ini pihak gereja bersiap mengubah volume rencana pembangunan gereja yaitu dengan mengubah tinggi menara lonceng. Pastor Immanuel sebagai pimpinan gereja Katolik Santo Joseph mengatakan:

“Sebenarnya pembangunan gereja yang baru akan bermotif bangunan

Cina dan mirip tempekong. Hal ini untuk mengenang leluhur mereka yaitu suku Thionghoa, karena yang membawa agama Katolik ke Karimun adalah keturunan Thionghoa tepatnya dari Kampung Pingkai. Namun untuk saat ini umat Katolik lebih banyak dari Flores.”

Selanjutnya beliau juga menambahkan:

“Motif pembangunan sendiri bukan untuk monumen tetapi untuk menampung jemaat gereja yang saat ini mencapai 1500-an jemaat. Agar jemaat dapat tertampung maka luas bangunan gereja sengaja diperbesar yaitu untuk kapasitas 750-an jemaat, sehingga gedung gereja nantinya bisa digunakan untuk dua kali kegiatan misa. Di samping itu bangunan yang diperbarui nantinya akan lebih indah sesuai dengan tata kota Kota Karimun yang terus bergerak maju dan berkembang.”

Gereja Metodis (Kristen)

Di samping masalah Gereja Katolik sebagaimana uraian di atas, terdapat peristiwa lain di sana yaitu konflik terkait masalah pendirian Gereja Metodis. Gereja Metodis Indonesia (GMI) terletak di RT.02/RW.04 Kampung Sukajaya, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral. Konflik terjadi setelah pihak Metodis bermaksud mengajukan izin pendirian gereja tersebut. Awalnya Metodis hanya mendirikan sekolah, tetapi kemudian mendirikan gereja. Izin dilengkapi dengan persetujuan 60 orang warga sekitar yang bertempat tinggal di RT.02/RW.04 Kampung Sukajaya, Kelurahan Sungai Pasir dan pernyataan 90 orang pemanfaat gereja. Sehingga pendirian gereja tersebut sebetulnya sudah layak mendapatkan izin. Namun setelah beberapa lama kemudian muncul penolakan warga lain terhadap rencana pendirian gereja tersebut.

Gereja sebetulnya akan memberikan kompensasi pembangunan dalam bentuk sarana dan fasilitas untuk warga. Namun ternyata respon warga terbagi dua, yakni setuju dan menolak. Menghadapi kondisi ini, atas inisiatif dari FKUB Kabupaten Karimun dilakukan langkah mediasi dengan mengadakan pertemuan di Aula Kantor Camat Meral pada tanggal 19/04/2013, pukul 8.30 s/d 10.00 WIB yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris FKUB Kabupaten Karimun, Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Drs. H. Afrizal, Camat Meral, Kapolsek Meral, Kesbangpol, Lurah Sungai Pasir, FKUB Kecamatan Meral dan masyarakat dari RT.02/RW.04 Kampung Sukajaya Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral. Sebanyak 60 (enam puluh) orang yang bertempat tinggal di RT.02/RW.04 Kampung Sukajaya, Kelurahan Sungai Pasir harus hadir dalam pertemuan dengar pendapat ini. Namun ternyata hanya 11 orang saja yang menghadiri pertemuan. Oleh karena itu, karena belum tercapainya kuorum maka pertemuan ditunda. Menghadapi situasi demikian Pemerintah Daerah belum bisa mengeluarkan izin pendirian karena menunggu situasi kondusif.

Pendirian Cetya (Buddha)

Selain permasalahan pembangunan gereja Katolik dan Kristen, konflik yang melibatkan umat Buddha pun pernah terjadi di sana yaitu ketika ada perusahaan yang membuat cetya untuk ibadat keluarga dan tamu perusahaan. Warga sekitar menolak karena tidak ada izin rumah ibadat. Terlebih lagi ada pemahaman di masyarakat bahwa cetya sama dengan vihara. Warga pun bermaksud melakukan pengrusakan cetya jika tetap berfungsi sebagai rumah ibadat dengan status tanpa izin. Namun demikian, saat ini pembangunan tersebut sedang dalam proses pengurusan izin melalui RT, RW dan seterusnya.

Di samping itu, konflik juga terjadi di antara umat Buddha dan Khonghucu, yaitu dalam hal rumah ibadat Klenteng. Hal ini disebabkan ornamen-ornamen yang terdapat pada Klenteng diakui oleh kedua umat sebagai rumah ibadat Buddha Tri Dharma dan sebagai rumah ibadat umat Khonghucu. Eksistensi Klenteng tersebut terus diperselisihkan oleh umat Khonghucu karena dianggap sebagai rumah ibadat mereka dan bukan milik umat Buddha. Saat ini penganut agama Khonghucu paling banyak di Tanjung Balai, sehingga konflik rumah ibadat Klenteng ini juga terjadi di sana.

Problem-Problem Keagamaan Daerah Perbatasan

Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Karimun

Sesuai PMA Nomor: 13 Tahun 2012, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun masuk tipe B. Untuk itu terdapat problem yang mendasar. Dahulu terdapat Seksi Pesantren, Seksi Penamas, Seksi Madrasah dan Seksi Haji. Namun saat ini, yang ada hanyalah Seksi Pendidikan Islam dan di dalamnya tergabung menjadi satu yaitu Seksi Pekapontren, Madrasah, dan Pendidikan Agama Islam (Pais). Sementara itu, Seksi Haji terpisah sendiri. Menurut Kasubbag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, idealnya Seksi Pekapontren dan Seksi Madrasah dan Seksi Pendidikan Islam dipisah, sebab tugasnya sangat banyak, terlebih saat ini di Karimun telah banyak berdiri pesantren, TPQ dan MDA. Sementara itu, untuk Seksi Haji sebenarnya bisa digabung dengan Seksi Bimas Islam sebab tugas terkait pelayanan haji itu lebih ringan dan tugas pokoknya hanya setahun sekali.

Struktur organisasi di Kementerian Agama saat ini juga dikeluhkan banyak pihak, sebab hanya ada Pembimas Islam

dan Buddha, tidak ada dari agama Katolik, Kristen, dan Khonghucu. Menurut Jamzuri, saat ini kehadiran perwakilan agama Katolik, Kristen, dan Khonghucu secara struktural dirasakan sangat dibutuhkan. Ia juga mengatakan, "misalnya untuk menghadiri kegiatan Kristen atau Katolik, dirinya merasa bahwa hatinya tidak menyatu jika berada di komunitas agama lain. Apalagi jika dirinya diminta menyalakan lilin atau memberi sambutan. Tetapi apabila terdapat Kepala Seksi dari agama yang bersangkutan yakni Kristen atau Katolik, hal tersebut akan lebih mudah. Selanjutnya terkait pelayanan keagamaan oleh Kantor Kementerian Agama untuk umat agama lain (selain Islam dan Buddha) Jamzuri mengatakan, "Saya sendiri tidak paham, saya hanya mengemukakan pada staf saya: jangan ada kesan tidak melayani".

Bimbingan dan Penyuluhan Keagamaan

Ada beberapa kendala yang dirasakan masyarakat dalam hal bimbingan dan penyuluhan keagamaan yang membutuhkan perhatian yaitu: *Pertama*, kultur masyarakat Karimun yang majemuk, yaitu multi etnis dan agama. Banyak masyarakat tinggal di kampung-kampung dengan pendidikan 'rendah'. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam bimbingan dan penyuluhan agama. *Kedua*, masih terdapat suku-suku terasing di Kecamatan Meral yaitu tepatnya di Kundur Utara yang sekarang jadi daerah Belat. Di daerah tersebut masyarakatnya banyak yang belum beragama. Agama Islam belum menjangkau sehingga masuklah misionaris. Pernah dilaporkan adanya penduduk yang pindah agama sekitar 15 orang. Mereka melapor kepada pihak kecamatan bahwa di samping pindah agama juga mengubah identitas nama. *Ketiga*, pembinaan agama terkadang realisasinya sulit dilakukan karena masyarakat yang diundang sering tidak mau datang, khususnya dari kalangan

Kristen, Buddha, dan Khonghucu. Hal ini dikarenakan umumnya mereka memiliki kesibukan kerja/usaha, apalagi jika waktunya 4 – 5 hari.

Agama Katolik

Secara umum kendala yang dihadapi umat Katolik di Karimun ada dua yaitu: *Pertama*, saat ini tidak ada pembimas Katolik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Sehingga tidak ada yang menjembatani kepentingan umat Katolik. Hal ini sudah pernah diusulkan tetapi menurut Kantor Kementerian Agama, hal tersebut merupakan wewenang Pusat. *Kedua*, hingga saat ini di Karimun tidak ada guru agama dari Katolik yang PNS.

Padahal kehadiran guru agama PNS Katolik sangat dibutuhkan sebab saat ini ada dua sekolah Katolik yang memberikan pendidikan keagamaan di Karimun yaitu Sekolah Katolik Santo Yoseph dan Sekolah Katolik Immanuel. Kegiatan pelajaran pembinaan agama dilakukan setiap minggu sekali. Untuk siswa SLTP dan SLTA, setiap hari Jumat, para guru Katolik mendatangi sekolah mereka seperti ke SMP 1 dan SMA 1. Pada saat itu, murid-murid yang beragama Katolik berkumpul di sana dan siap menerima pelajaran agama Katolik. Sedangkan untuk siswa SD pendidikan di lakukan di gereja pada hari Minggu setelah acara kebaktian gereja. Pihak Katolik baru menerima bantuan dari Kementerian Agama dalam bentuk insentif yaitu pada tahun 2013, para guru menerima sebesar 600 ribu untuk 1 semester. Jumlah guru yang menerima dana tersebut adalah sebanyak 35 orang. Selain bantuan tersebut tidak ada lagi bantuan lainnya. Dalam pembinaan, gereja memiliki dua orang Katekis dan beberapa sukarelawan. Pembinaan agama juga dilakukan oleh Komunitas Basis Gereja (KGB) yang jumlah anggotanya tiap KGB adalah 15 sampai dengan 20 orang.

Meskipun saat ini tidak pernah ada konflik antar umat beragama. Namun kerukunan antar umat beragama, khususnya bagi umat Katolik belum secara nyata dirasakan. Saat ini pastor dan pimpinan gereja biasa mengucapkan ucapan selamat hari raya bagi umat Muslim namun tidak sebaliknya. Selama ini antara tokoh agama tidak saling mengenal. Hal ini dikarenakan tidak adanya pertemuan antar tokoh agama di Karimun yang menyebabkan tidak saling mengenalnya antar tokoh umat agama satu dengan lainnya (Wawancara dengan Pastor Immanuel, Maret 2014).

Agama Kristen

Problem umat Kristen hampir sama dengan Katolik yaitu tidak ada pembimas Kristen di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun sehingga tidak ada yang menjembatani kepentingan umat Kristen. Selain itu, di Karimun juga tidak ada penyuluh agama dan guru agama dari Kristen yang PNS.

Pusat keagamaan bagi Kristen untuk sinode Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) berpusat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Resort Tanjung Balai Karimun. Gereja ini merupakan gereja Kristen terbesar dan tertua di Pulau Karimun. Tahun lalu ada kegiatan ulang tahun gereja yang ke 60. Saat itu peringatan dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. Umat protestan yang menjadi jemaat gereja HKBP ada sekitar 650 KK. Di Kabupaten Karimun ada 7 Gereja HKBP. Sedangkan untuk di pulau Karimun saja hanya ada empat gereja HKBP. Gereja HKBP ini dipimpin oleh pendeta Albenar Silaen.

Mengenai kegiatan gereja, setiap hari ada ibadah yang dilakukan antara pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.00 pagi, dan pada malam hari yaitu antara pukul 20.00 sampai dengan pukul 21.00. Kegiatan ibadah remaja dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan

untuk anak-anak kegiatan dilakukan hari Minggu bekerjasama dengan sekolah. Saat ini belum ada guru agama dari Protestan yang PNS dan pengurus gereja yang berjumlah 4 orang, statusnya seperti PNS bisa ditugaskan atau dipindahkan kapan saja. Dua orang di antaranya adalah pendeta. Secara umum, pendidikan keagamaan umat Protestan di Karimun dilakukan oleh 16 orang guru yang memperoleh insentif dari Kementerian Agama.

Di samping persoalan tidak adanya pejabat dari Kristen dalam struktur di Kantor Kementerian Agama, hal lain yang menjadi problem adalah tidak adanya penyuluh agama dan guru PNS serta kurang terjalinnya hubungan komunikasi antar tokoh agama. Di Karimun tidak ada pertemuan yang dilakukan secara periodik antara para tokoh lintas agama, bahkan pertemuan itu belum pernah dijadwalkan secara khusus. Namun demikian, untuk komunikasi antar umat beragama, terdapat forum pembauran yang digagas oleh pemerintah daerah yang kepesertaannya adalah umat dari berbagai agama. Pendeta Albenar Silaen mengatakan, "saat ini sangat dibutuhkan adanya komunikasi yang intens antar tokoh agama, supaya mereka saling mengenal satu dengan lainnya. Hal tersebut penting, sebab keadaan saat ini berbeda dengan dahulu. Pada masa lalu mobilitas sosial belum seperti sekarang, masyarakat dulu sering berkomunikasi lintas agama meski secara informal, para orang tua dulu bisa saling kenal satu sama lain. Namun dengan kesibukan masyarakat saat ini maka komunikasi yang bersifat lintas agama itu nyaris tidak ada bahkan generasi muda pun tidak saling mengenal. Tentu hal ini bisa sangat berbahaya di masa yang akan datang."

Agama Buddha

Di Karimun jumlah vihara ada 50-an lebih, termasuk Klenteng, dan Cetia.

Rumah ibadat Buddha paling banyak di Buru, Moro, dan Tanjung Batu, Kundur Barat. Rumah ibadat itu berafiliasi pada beberapa Majelis Agama Buddha seperti Majelis Buddhayana Indonesia, Megabuddhi (Therevada), Mapanbuddhi, NSI, Walubi, dan lain-lain. Persoalan yang dihadapi umat Buddha adalah antara lain: saat ini tidak ada pengawas pendidikan agama di sekolah; belum ada yang diangkat menjadi pengawas sebab para guru belum ada yang pernah mengikuti diklat pengawas; belum ada penyuluh PNS dan non-PNS.

Saat ini di Kabupaten Karimun belum ada Bikku. Bikku biasanya didatangkan dari Batam. Adapun acara ibadat (kebaktian) dipimpin oleh pandita yang jumlahnya saat ini ada sebanyak 19 orang. Sedangkan tokoh agama Buddha yang non-pandita saat ini jumlahnya 23 orang. Guru agama Buddha memberikan pengajaran agama bagi para siswa dengan sistem mengikuti sekolah mingguan. Para guru yang mengajar di sekolah mingguan mendapat insentif dari Kantor Kementerian Agama sebesar 3,4 juta per orang per tahun. Jumlah guru yang mendapatkan insentif tersebut adalah 15 orang di tahun 2014. Hingga saat ini belum pernah ada bantuan fisik (pembangunan vihara, rehab bangunan, atau material lainnya). Kalaupun ada adalah bantuan rehabilitasi vihara di Tanjung Batu yang diperoleh dari Kementerian Agama Pusat.

Secara struktural, urusan agama Buddha hanya dipegang oleh satu orang yaitu penyelenggara Buddha yang berkedudukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun yang saat ini dijabat oleh Bapak Sudirman. Dalam tugasnya, ia banyak mendatangi rumah-rumah ibadat, dalam rangka menghadiri kegiatan keagamaan, pernikahan, dan pembinaan keagamaan.

Analisis

Bromley (1989) menyajikan sebuah teori hirarki kebijakan. Terdapat tiga level yang berhubungan dengan hirarki proses penyusunan kebijakan yaitu *policy level*, *organizational level*, dan *operational level*. Sementara itu hubungan Kementerian Agama Pusat dan Kantor Kementerian Agama Propinsi dan Kabupaten saat ini bersifat *principal-agent*. Pusat sebagai *principal*, memberikan kuasanya bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama kepada Kantor Kementerian Agama. Kantor Kementerian Agama merupakan *agent*, atau pelaksana yang memiliki kewenangan delegatif dari pusat dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Model *principal-agent* tersebut mengindikasikan adanya hirarki kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Bromley, dari tingkat pusat sampai daerah. Jika dikotekstualisasikan, dalam kaitannya hubungan pusat dan daerah, *policy level* berada dalam kewenangan Kementerian Agama Pusat. Kebijakan pada ranah *organizing level* ada pada Kantor Kementerian Agama Propinsi. Sementara tingkat operasional berada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan KUA.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari peran institusi itu sendiri. Esman (1972) menjelaskan lima komponen dalam institusi yang harus dibangun yaitu: kepemimpinan, kebijakan, program/ layanan, sumber daya, dan struktur organisasi (Esman dalam Moeldoko 2014). Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa pelaksanaan program pembangunan di bidang keagamaan oleh Kantor Kementerian Agama berhasil pada satu sisi, namun belum berhasil pada sisi lain. "Ketimpangan" ini dirasakan oleh pihak dari tiga agama yaitu Katolik, Kristen, dan Khonghucu di mana dalam pelayanan keagamaan

seolah ada diskriminasi terhadap mereka. Hal ini disebabkan setidaknya oleh dua hal. *Pertama*, tidak adanya perwakilan umat Katolik, Kristen, dan Khonghucu dalam struktur organisasi karena adanya keharusan daerah (Kankemenag) untuk mematuhi kebijakan pusat (Kemenag). Struktur organisasi Kankemenag berdasarkan aturan yang ada harus disesuaikan dengan PMA No 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Ketiadaan perwakilan umat agama Katolik, Kristen, dan Khonghucu dalam struktur telah mengakibatkan mereka pada posisi yang lemah secara kultur politik. Hal tersebut berimbas pada tersumbatnya saluran komunikasi antara para tokoh agama dengan para pejabat Kantor Kementerian Agama juga dengan para tokoh agama lainnya. Di sini struktur organisasi Kantor Kementerian Agama nampaknya kurang mengacu kepada akurasi fakta yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat, sehingga bisa muncul anggapan bahwa kebijakan dan program pembangunan keagamaan ini tidak dirancang secara matang dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, persoalan leadership atau kepemimpinan yaitu sebagai kemampuan mempengaruhi, menuntun, dan membimbing seseorang atau kelompok untuk mencapai cita-cita ataupun tujuan organisasi. Di sini kepemimpinan dituntut mempunyai visi dalam pribadinya sebagai landasan berpijak dalam menggerakkan organisasi, dalam hal pelayanan keagamaan perlu adanya visi kepemimpinan yang mau dan mampu menghargai perbedaan dan tanpa diskriminasi kepada setiap warga negara sesuai konstitusi. Munculnya kasus diskriminasi terhadap komunitas Syiah, Katolik dan Kristen dalam izin pendirian dan bantuan rumah Ibadat, maupun pengangkatan PNS bagi penyuluh dan guru agama dari umat agama non-Islam, serta tidak adanya

ruang komunikasi yang reguler antara tokoh agama, menunjukkan lemahnya sisi visi *leadership* dalam memaknai hak beragama, berkeyakinan, dan jaminan kerukunan oleh para pejabat struktural Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.

Penutup

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka disimpulkan beberapa hal yakni: *Pertama*, penduduk Kabupaten Karimun jumlahnya 272.985 jiwa, tersebar dalam 54 pulau dari 249 buah pulau yang ada. Hal ini menyebabkan beberapa masyarakat di kepulauan yang jauh dari pusat pemerintahan daerah masih sulit tersentuh program-program pembangunan bidang keagamaan. Sementara itu posisi Karimun sebagai kawasan perbatasan dari Karimun, maka mobilitas sosial sangat tinggi, baik dari Karimun ke luar maupun dari luar ke Karimun sehingga rentan dengan 'asimilasi' sosial budaya, terlebih jika Karimun dulunya pernah dikenal sebagai kota 'Texas' tempat para wisatawan menikmati 'hiburan libido' *Kedua*, Kementerian Agama Kabupaten Karimun, dalam rangka optimalisasi pelayanan keagamaan sejauh ini telah maksimal berusaha memenuhi pelayanan keagamaan di bidang pembangunan sarana dan prasarana keagamaan (rumah ibadat dan pembangunan KUA), pelayanan oleh KUA (perkawinan, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf, keluarga sakinah), bimbingan dan pembinaan keagamaan masyarakat, pelayanan haji, serta kerukunan antar umat beragama. *Ketiga*, pelayanan keagamaan di Kabupaten Karimun yang cukup menggembirakan adalah di bidang bimbingan dan pembinaan keagamaan terutama di tingkat usia pra sekolah (TPA/TPQ) dan majelis talim. Jumlah TPA/TPQ dan majelis talim terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini relatif efektif dalam mengurangi kesan

Karimun sebagai daerah 'hiburan libido' bagi wisatawan. *Keempat*, Struktur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun hanya "menerima" kebijakan yang ditetapkan oleh pusat. Struktur organisasi hanya mengikuti PMA No 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sehingga tidak memenuhi kebutuhan daerah, yaitu antara lain belum adanya perwakilan umat Katolik, Kristen, Khonghucu dalam struktur organisasi Kantor Kementerian Agama. Hal ini berpengaruh pada kurang maksimalnya Kantor Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan khususnya kepada umat dari tiga agama tersebut.

Disamping kesimpulan-kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal: *Pertama*, perlunya kebijakan dan program pembangunan keagamaan di Karimun sebagai kawasan perbatasan yang dirancang secara matang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PMA Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama dalam implementasinya tidak boleh kaku, melainkan perlu fleksibel, disesuaikan dengan kondisi lokal dengan mengacu kepada akar masalah yang benar-benar dirasakan oleh Kantor Kementerian Agama dan bertumpu kepada sumber daya yang ada. *Kedua*, perlu adanya *leadership* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun yang memiliki visi pelayanan yang menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, sehingga dapat melindungi dan melayani semua aliran, paham, dan kelompok keagamaan dengan netral dan tidak diskriminatif. Hanya dengan visi *leadership* demikian Kantor Kementerian Agama akan bisa melindungi kelompok minoritas seperti komunitas Syiah, Katolik, Kristen, dan Khonghucu serta tidak melakukan 'pembiaran' terhadap praktik-praktik intoleransi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. *Privatisasi Agama: Globalisasi atau Melemahnya Referens Budaya Lokal?* Makalah seminar, Balai Kajian sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 9 November 1995.
- Appadurai, Arjun. "Introduction: Commodities and the Politics of Value" dalam Arjun Appadurai (ed.), *The Social Life Things*. Cambridge: Cambridge University Press. 1991.
- Bromley, Daniel W. *Economic Interest and Institutions; The Conceptual Foundation of Public Policy*. Oxford: Basil Balck Well Inc, 1989.
- Beyer, Peter. "Privatization dan Public Inffence of Religion in Global Society" dalam Mike Featherstone (ed.), *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity*. London: Sage Publication, 1991.
- Ismail, Faisal. *Republik Bhinneka Tunggal Ika: Mengurai Isu-Isu Konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2012.
- Mudzhar, Atho. "Lingkungan dan Peran Strategis FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Persatuan Nasional." Makalah. Workshop Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan FKUB, 3-4 September 2013 di Hotel Jayakarta, Jakarta. 2013.

Moeldoko. *Kebijakan dan Scenario Planing Pengelolaan Kawasan Perbatasan*. Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana UI, 2014.

Kabupaten Karimun. *Profil Daerah Kabupaten Karimun; Azam Dipasak Amanah Ditegak*. 2013.

Susan, Novri. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.